

**PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI ADMINISTRATOR
PEMBANGUNAN DI DESA SELLI KECAMATAN LAPPARIAJA
KABUPATEN DATI. II BONE**



UNIVERSITAS

BOSUWAA

O L E H

AMIRUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI ADMINIS-
TRATOR PEMBANGUNAN DI DESA SELLI KECAMATAN
LAPPARIAJA KABUPATEN DATI. II . BONE.

Nama Mahasiswa : A M I R U D D I N

Nomor Stb/NIRM : 4586020015 / 871133062

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

(PROF.DR.H.M.SYUKUR ABDULLAH)

(DRS.H.RUSDIN NAWI)

Mengetahui

Dekan Fakultas Isipol

Ketua Jurusan Adminis-
trasi Negara.

(DRS. H. MOH. THALA)

(PROF.DRS.H.SADLY AD, MPA)

Tanggal Pengesahan.....10 Mei.....1991.

KATA PENGANTAR

Bismillahir rahmanir rahim.

Tiada kata yang lebih pantas yang bisa penulis ucapkan selain ucapan Syukur Alhamdulillah ke khadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan study pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu penulis senantiasa menerima kritik dan koreksi yang konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak berupa bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana semula. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, diiringi doa semoga Allah SWT dapat memberikan fahala dan balasan yang setimpal.

Ucapan terima kasih ini, penulis tujukan kepada yang terhormat :

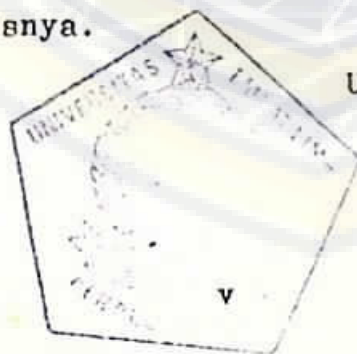
1. Bapak Prof.Dr.H.M.Syukur Abdullah; dan Drs. H. Rusdin Nawi selaku pembimbing pertama dan pembimbing kedua dalam pembuatan skripsi ini, dengan segala keikhlasan meluangkan waktunya pada penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak rektor Universitas "45" Ujung Pandang beserta staf, yang telah memusatkan perhatiannya untuk kelangsungan civitas akademika Universitas "45" Ujung Pandang.
3. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang beserta seluruh staf yang senantiasa aktif membina perkuliahan selama ini.
4. Bapak Kepala Wilayah Kecamatan Lappariaja bersama stafnya serta Kepala Desa Selli yang telah banyak memberikan bantuan serta fasilitas-fasilitas selama penulis mengadakan penelitian.
5. Ibunda Naheriah serta seluruh sanak saudara yang telah banyak merelakan sesuatunya, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat dukungan, karena tanpa semua itu tidak mungkin berjalan secara alamiah, seperti apa yang telah penulis peroleh pada saat ini.
6. Seluruh rekan-rekan dan handai taulan serta semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, sekali lagi melalui kesempatan ini penulis ucapkan terima kasih.

Semoga skripsi ini bermamfaat adanya dalam rangka pengembangan dan penataan sistem pemerintahan dalam usaha pembangunan di Kecamatan Lappariaja pada umumnya dan Desa Selli pada khususnya.

Ujung Pandang Februari 1991

Penulis:



DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
Abstrak.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II : STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA DAN KONSEPSI PEMBANGUNAN PEDESAAN.....	10
A. Batasan Pengertian/Landasan Teori.....	10
B. Dasar dan Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa.....	18
C. Struktur Organisasi dan Tugas Pemerintahan Desa.....	23
D. Program Pembangunan Pedesaan.....	28
E. Fungsi dan Peranan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan.....	27

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI.....;	33
A. Keadaan Geografis Desa Selli.....	33
B. Keadaan Penduduk dan Perekonomian Desa Selli.....	34
C. Kebijaksanaan Pemerintah dalam Pembangunan Desa Selli.....	38
D. Hasil-Hasil Pembangunan yang dicapai Desa Selli.....	41
BAB IV : REALISASI PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN.....	48
A. Peranan Kepala Desa Selli dalam Melaksanakan Fungsinya.....	48
B. Faktor-Faktor Penghambat.....	71
BAB V : P E N U T U P.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

No.Urut	No.Tabel	Nama Tabel	halaman
1.	01	Luas Areal Pertanian di Desa Selli	42
2.	02	Jenis-Jenis Ternak dalam Wilayah Desa Selli	44
3.	03	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data menurut pemerintah	49
4.	04	Peranan Kepala Desa Selli sebagai Pengendali dan Pengumpul data menurut Tokoh Masyarakat	50
5.	05	Peranan Kepala Desa Selli sebagai Pengendali dan Pengumpul data menurut Masyarakat	51
6.	06	Sebaran Menurut Responden dan Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan Pengumpul data	51
7.	07	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana Desa	52
8.	08	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa menurut Tokoh Masyarakat	53
9.	09	Peranan Kepala Desa Selli dalam mengendalikan dan menyusun rencana desa menurut Masyarakat	54
10.	10	Sebaran menurut responden dan Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa	55
11.	11	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan pembangunan menurut pemerintah	56

No.Urut	No.Tabel	Nama Tabel	halaman
12.	12	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan menurut Tokoh Masyarakat	57
13.	13	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan menurut masyarakat	57
14.	14	Sebaran menurut responden dan Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan	58
15.	15	Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa menurut pemerintah	59
16.	16	Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa menurut masyarakat	60
17.	17	Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa menurut masyarakat	61
18.	18	Sebaran menurut responden dan Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa	61
19.	19	Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut pemerintah	62
20.	20	Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut Tokoh Masyarakat	63
21.	21	Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut masyarakat	64
22.	22	Sebaran menurut responden dan Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat	65

No.Urut	No.Tabel	Nama Tabel	halaman
23	23	Peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan menurut pemerintah	66
24.	24	Peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan menurut Tokoh Masyarakat	66
25.	25	Peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan menurut Masyarakat	67
26.	26	Sebaran menurut responden dan peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan	68
27.	27	Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi menurut pemerintah	69
28.	28	Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi menurut Tokoh Masyarakat	69
29	29	Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi menurut masyarakat	70
30.	30	Sebaran menurut responden dan Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi	71

A B S T R A K

Pembangunan Desa merupakan Topik yang senantiasa sangat diperbincangkan, hal ini disebabkan hampir seluruh program dan proyek pembangunan akan menyentuh pedesaan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Untuk keberhasilan ini, salah satu penentu pokok adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan. Hal inilah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dengan study kasus Desa Selli yang terdiri dari tiga dusun yaitu Dusun Pammase, Dusun Libureng dan dusun Nyappareng.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa Selli dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan serta hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan.

Penelitian ini adalah merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan langsung ke daerah penelitian, teknik wawancara kepada beberapa informan kunci serta interview kepada para responden dengan menggunakan penuntun interview.

Hasil penelitian terhadap peranan Kepala Desa Selli sebagai Administrator pembangunan menunjukkan bahwa Kepala Desa Selli telah menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam bidang membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan. Sedangkan peningkatan peranan yang masih diharapkan adalah dalam hal penyusunan laporan dan pembuatan inventarisasi. Sedangkan hambatan yang ditemui meliputi bidang ekonomi sosial budaya, agama dan keyakinan penduduk serta bidang keamanan.



BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui, bahwa negara Republik Indonesia memiliki batas kewilayahan yang sangat luas dan jumlah penduduk yang terbilang padat dengan latar belakang pendidikan dan kebudayaan yang berbeda. Kondisi seperti ini menimbulkan sifat kehidupan yang heterogen. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai macam keinginan dan aspirasi dari masyarakat yang berbeda-beda disamping terdapatnya unsur-unsur persamaan.

Walaupun demikian mereka tetap bersatu dalam ikatan norma yang telah disepakati bersama, yaitu falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari kedua prinsip dasar inilah yang kemudian dijadikan dasar pijakan, sumber dan rujukan dalam upaya mengembangkan dan memenuhi seluruh aspek kepentingan dan menata sistem pola kebijaksanaan politik dan pemerintahan Indonesia.

Dalam rangka pencapaian tujuan Pembangunan Nasional yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah menempuh berbagai macam kebijaksanaan dengan melaksanakan berbagai macam pembangunan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Adapun mengenai tujuan pembangunan nasional tercantum dalam Ketetapan MPR Nomor II / MPR / 1983 tentang Garis-Garis

Besar Haluan Negara yang berbunyi :

"Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, berdaulat, tertib dan damai".(TAP MPR No.II 7 MPR/83,tentang GBHN : 42).

Sejalan dengan itu, dalam pelaksanaan pembangunan dewasa ini pemerintah menggalakkan dan berorientasi pada pembangunan di daerah pedesaan. Hal ini dimungkinkan karena sebagian besar penduduk Indonesia berada di daerah pedesaan. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang sasaran utamanya adalah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri.

Perhatian pemerintah pada pembangunan di daerah pedesaan semakin besar, hal ini nampak pada semakin meningkatnya intensitas program dan proyek beserta pembiayaannya untuk daerah pedesaan. Olehnya pembangunan desa bukan hanya akan menjadi obyek pembangunan namun juga diharapkan harus mampu menjadi subyek dalam pelaksanaan pembangunan dalam arti bahwa masyarakat desa berperan dan mampu melaksanakannya sendiri.

Sehubungan dengan itu, B.N.Marbun,SH dalam bukunya Proses Pembangunan Desa, mengatakan :

"Kepala Desa sebagai cntral authority berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan masyarakat dan administrator pembangunan, mempunyai peranan yang sangat menentukan terhadap berhasilnya pembangunan

desa karena Kepala Desa langsung berhadapan dengan masyarakat dan paling menguasai lapangan". (Marbun, SH, 1988:28)

Oleh karena itu salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan di desa adalah bagaimana kemampuan kepala desa dalam mengembangkan dan menggerakkan serta menggairahkan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian pola kepemimpinan Kepala Desa akan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan dan tercapainya tujuan tersebut.

2. Batasan Masalah.

Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia dan bagi seluruh masyarakat Indonesia merupakan strategi pembangunan yang tidak boleh gagal. Mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di daerah pedesaan, maka untuk tercapainya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, sasaran pembangunan harus diarahkan juga ke daerah pedesaan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang sasaran utamanya adalah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk tumbuh dan berkembang atas kekuataannya sendiri.

Didalam pelaksanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat desa. Untuk itu pemerintah wajib membina dan mengembangkan potensi itu sehingga tumbuh kepercayaan masyarakat, bahwa tiap usaha pembangunan akan dapat dirasakan hasilnya guna perbaikan dan peningkatan kehidupan mereka. Selain itu salah satu faktor yang sangat menentukan

keberhasilan pembangunan di desa adalah bagaimana peranan Kepala Desa dalam mengembangkan dan menggerakkan serta menggerakkan masyarakat desa dalam pembangunan. Dan juga kemampuan mengelola dan memanfaatkan sarana yang ada, kemampuan intelektual, kewubawaan dan lain sebagainya.

Walaupun kenyataannya tidak seluruhnya hal ini dimiliki oleh Kepala Desa, ini disebabkan masih banyaknya sikap kepemimpinan Kepala Desa dalam menentukan sikapnya sendiri di satu pihak tanpa menghiraukan adanya permusyawaratan pada tingkat LKMD, sedang di pihak lain adanya sikap masyarakat yang sering tidak merasa puas dengan kepemimpinan seorang Kepala Desa sehingga enggan dan tidak mau berpartisipasi.

Dengan adanya kenyataan seperti ini maka masalah dalam skripsi ini dapat dibatasi sebagai berikut :

- a. Bagaimana peranan Kepala Desa Selli dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator Pembangunan ?
 - b. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Selli dalam pelaksanaan pembangunan ?
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dan penulisan skripsi ini adalah dengan harapan :

- Dapat diperoleh penjelasan tentang Kemampuan Kepala Desa Selli dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan.

- Mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan Peranan Kepala Desa Selli sebagai administrasi pembangunan.

Sedangkan kegunaan yang diharapkan dengan penulisan skripsi ini adalah agar dapat menambah cakrawala berpikir bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti pendidikan pada Universitas "45" Ujung Pandang .

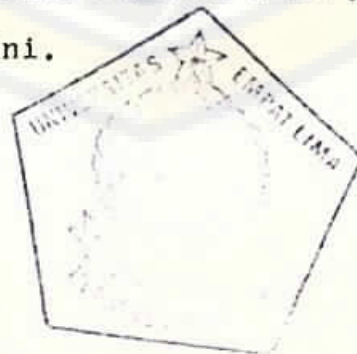
Selain itu diharapkan pula sebagai calon sarjana dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai input bagi pemerintah daerah di Kecamatan Lappariaja dalam merealisasikan program pembangunan.

D. Metode Penelitian.

Guna mendapatkan hasil kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, penulis dalam pembahasan selanjutnya terlebih dahulu merampungkan dan melengkapi data - data yang bertalian dengan judul skripsi ini, dengan mempergunakan metode penelitian. Adapun metode penelitian yang dimaksud adalah :

a. Metode Study Kepustakaan (library study).

Study kepastakaan dimaksudkan adalah dengan melakukan atau membaca buku-buku serta bahan kuliah yang pernah penulis peroleh atau dokumen-dokumen lain yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini.



b. Penelitian Lapangan (field research).

Penelitian dilakukan di lokasi yang merupakan obyek permasalahan.

1. Dasar Pokok Penelitian.

Dasar pokok penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah Survey.

2. Type Penelitian.

Type penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu ingin menggambarkan secara realistis mengenai peranan yang dimainkan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan desa.

3. Daerah penelitian.

Daerah penelitian adalah Desa Selli Kecamatan Lappari-
aja Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

- Interview (wawancara) pada beberapa informan kunci (key informan), yaitu :
 - a. Kepala Desa.
 - b. Sekretaris Desa.
 - c. Pemuka Agama.
 - d. Pemuka masyarakat.
 - e. Kepala Dusun.

- Interview dengan menggunakan penuntun interview pada para responden.
- Observasi yaitu mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada obyekn yang menjadi lokasi penelitian, yang berarti penulis akan berusaha melihat secara langsung kegiatan Kepala Desa dalam memainkan peranannya untuk mencapai tujuan pembangunan.

5. Populasi yaitu semua Kepala Keluarga yang ada di Desa Selli. Dari populasi tersebut penulis memilih responden secara stratified random sample dengan strata perbandingan 1 : 2 : 3 (atas, menengah, bawah) dari jenis pekerjaan Kepala Keluarga.

Adapun jumlah responden dari hasil random tersebut sebanyak 60 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Petani 30 orang : 5 orang ekonomi atas, 10 orang ekonomi menengah dan 15 orang ekonomi rendah.
- b. Petani merangkap pedagang : 5 orang ekonomi atas , 10 orang ekonomi menengah dan 15 orang ekonomi rendah.

6. Model analisa.

Model analisa yang digunakan adalah kualitatif.

5. Sistematika Pembahasan.

Secara keseluruhan skripsi ini penulis membahasnya dalam lima bab. Setiap bab terbagi lagi atas sub bab, secara terperinci pembahasan skripsi adalah sebagai berikut :

Bab pertama, Pendahuluan, mengemukakan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab pertama ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum dari keseluruhan isi skripsi dengan tujuan agar pembaca dapat memahami jalan pemikiran penulis terhadap permasalahan yang diungkapkan.

Bab kedua, mengemukakan tinjauan pustaka, pada bab kedua ini penulis sediakan khusus untuk mengemukakan landasan teoritis bagi pembahasan bab-bab selanjutnya. Sehubungan dengan itu bab kedua ini terdiri atas lima sub bab, masing-masing batasan pengertian, Dasar dan Tujuan Pembangunan Masyarakat Pedesaan, Struktur organisasi dan tugas pemerintahan Desa, Program pembangunan pedesaan, fungsi dan peranan Kepala Desa dalam pembangunan.

Bab ketiga, Gambaran Umum Lokasi, pentingnya pembahasan ini adalah untuk mencari dan mengemukakan fakta, data dan informasi yang dibutuhkan dalam pembahasan bab selanjutnya. Dengan adanya data lengkap itu dapat pula diketahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah terutama pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri dalam merealisasikan program pembangunan.

Pada bab ketiga ini terdiri atas Keadaan Geografis Desa, Keadaan Penduduk dan Perekonomian Desa, Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunan Desa dan yang terakhir adalah Hasil-Hasil Pembangunan yang dicapai.

Bab keempat, Realisasi Peranan Kepala Desa Selli sebagai Administrator Pembangunan. Didalam bab empat ini dilaporkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan selama penelitian, kecuali itu dikemukakan pula pembahasan dan analisis dari data tersebut dalam ruang lingkup masalah.

Bab kelima, Penutup. Seperti lazimnya dalam penulisan karya ilmiah, pada akhir pembahasan dikemukakan kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran-saran bagi upaya penyempurnaannya.

STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA
DAN KONSEPSI PEMBANGUNAN PEDESAAN

A. Batasan Pengertian / Landasan Teori.

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu "Peranan Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Dati .II. Bone", maka sebagai landasan teoritis terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian dasar komponen-komponen yang terkandung dari judul skripsi, yaitu :

1. Peranan
2. Kepala Desa
3. Administrator Pembangunan
4. D e s a
5. Administrator
6. Pembangunan dan Pembangunan Desa.

1. Peranan

Ada beberapa pengertian yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pengertian peranan, antara lain sebagai berikut : " Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa)". (W.J.S.Poerwadarminta, 1986 : 735).

Sedangkan Suryono Sukanto, SH,MA, mengatakan bahwa : "Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status sesuatu" (Suryono Sukanto, 1974 : 31).

Dari dua pengertian diatas sekalipun redaksinya berbeda akan tetapi pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama,yaitu

kata status pada orang-orang tertentu dalam menjalankan tugasnya. sehingga dalam uraian ini penulis hanya mengemukakan bagaimana cara menjalankan fungsi atau status secara / dinamis dan kreatif dari orang-orang tertentu dalam melaksanakan tugasnya.

2. Kepala Desa

Ferkataan "Kepala Desa" di Indonesia mempunyai sebutan yang berbeda-beda. Istilah ini sebagian besar digunakan karena pengaruh adat dan bahasa daerah yang bersangkutan. sebagai contoh dapat dikemukakan pendapat Sutarjo Kartohadi - kusumo yang dikutip oleh Ny.Dra.Sumber Saparin, (1970 : 30) :

".1....Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi(Jawa Tengah) ; Mandor, Kekolot, Lembur (Jawa Barat, Banten) ; Kejura , Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) ; Pengulu Andika (Sumatera Barat); Penyimpang Kepala Mar- ga(Sumatera Selatan); Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu , Ambon); Raja Penusunan (sekitar Danau Toba); Kesair Pengulu Melaho (Bolang Mangondow, Kalimantan Selatan)".

Adapun di Sulawesi Selatan sebutan Kepala Desa ini ber beda misalnya di Kabupaten Soppeng, Wajo, Pinrang, Sidenreng Rappang disebut dengan Kepala Wanua, sedangkan di Kabupaten Jeneponto dan Takalar disebut Karaeng.

Mengingat penggunaan istilah yang berbeda-beda ini dapat menimbulkan kekeliruan administrasi pemerintahan maka ber- dasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.309 /IX/1973 maka sebutan Pimpinan Peme- rintahan di tingkat Desa di Sulawesi Selatan diseragamkan de- ngan istilah Kepala Desa dengan pengertian sebagai berikut :

"Kepala Desa ialah Kepala Pemerintahan di desa yang diangkat dan diberhentikan oleh yang berwenang serta memenuhi syarat-syarat pengangkatan sesuai dengan syarat kepegawain yang berlaku dan akan diberlakukan dan atau berlaku kepadanya".

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone No.6 tahun 1981 Pasal 3 ayat (1) juga dijelaskan : "Kepala Desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa".

Dengan melihat penjelasan di atas maka jelas Kepala Desa adalah pemerintahan pada wilayah administratif terendah yang disebut desa.

3. Administrator Pembangunan.

Sebelum penulis mengemukakan pengertian administrator pembangunan maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian administrasi pembangunan sebagai asal kata dari administrator pembangunan.

"Keseluruhan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan".(Sondang P.Siagian,MPA.Ph.D,1974 : 4).

Selain pengertian administrasi pembangunan yang dikemukakan oleh Dr.S.P.Siagian di atas, juga terdapat pengertian yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo,(1987:13) sebagai berikut :

"Pada pokoknya administrasi pembangunan diartikan sebagai proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara dan pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan didalam berbagai aspek kehidupan" .

Dengan bertolak dari kedua pengertian tentang administrasi pembangunan yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik suatu gambaran pengertian tentang administrator pembangunan yaitu orang-orang yang melaksanakan fungsinya dengan kerja sama dengan orang lain yang berperan aktif dalam usahanya merealisasikan perubahan-perubahan (inovasi) dan menggerakkan pembangunan untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan sekarang.

Seperti yang telah disinggung terdahulu, maka pada dasarnya suatu definisi walaupun berbeda redaksi, akan tetapi pada prinsipnya mempunyai maksud yang sama, sebab definisi tiada lain adalah batasan pengertian yang dikemukakan dan disepakati para ahli.

4. Desa

Ada beberapa pendapat yang dapat diungkapkan dalam mencoba menerangkan apa yang dimaksud dengan desa atau lebih tegas lagi definisi tentang desa. Perbedaan pengertian yang timbul disebabkan perbedaan sudut pandang tentang desa itu sendiri.

Dari segi pergaulan hidup, Dr. P. J. Bouman seperti yang dikutip oleh Drs. I. Nyoman Beratha dalam bukunya "Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa", mengemukakan definisi bahwa :

"Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak

alam. Dan dalam tempat tinggal itu banyak ikatan- ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial". (Drs.I.Nyoman Beratha, 1982 : 26-27).

Sedangkan menurut Dr.R.D.H.Koesoemahatmadja,SH (1978 : 6) :

"Desa adalah salah satu bentuk asli dari masyarakat yang tinggal bersama dari beberapa ratus sampai beberapa ribu orang yang merupakan "face to face group"(kalau tidak saling kenal-mengenal, mereka paling sedikit mengenal mukanya), Faktor-faktor mana mempunyai daya pengikat yang kokoh, sehingga mereka bersatu, sekeluarga / seketurunan dan seterusnya".

Litinjau dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintahan, maka desa diberi batasan sebagai berikut :

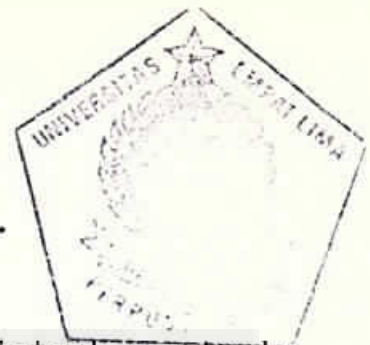
"Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan adalah pula " badan pemerintahan" yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya"(Drs.I.Nyoman Beratha , 1982 : 27).

Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa dijelaskan :

"Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dari beberapa kutipan di atas, secara jelas dapat kita melihat dan dapat menarik kesimpulan pengertian bahwa desa, baik secara pergaulan hidup maupun ditinjau dari segi hubungan dengan penempatan dalam susunan tertib pemerintahan, memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya kehidupan bersama.



- b. Adanya kesatuan hukum
 - c. Adanya persekutuan keluarga yang menonjol.
5. Administrator

Untuk membuka pengertian tentang administrator maka berikut ini akan dikemukakan terlebih dahulu pengertian administrasi sebagai asal kata dari administrator.

"Administrasi pada hakekatnya adalah mengarahkan kegiatan-kegiatan kita secara terus-menerus menuju ke tercapainya tujuan, dan mengendalikan sumber-sumber daya beserta gerak-gerik pemamfaatannya sesuai dengan peraturan-peraturan dan rencana-rencana kita.
(Pradjudi Atmosudirdjo, 1986:23)

Sedangkan menurut Sondang P.Siagian, MPA, Ph.D. (1981 : 3) administrasi adalah "keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Lebih lanjut Prof.Dr.Mr.S.Pradjudi Atmosudirdjo (1986:25) menjelaskan :

" Administrator menjalankan atau melakukan administrasi terhadap organisasi yang dia pimpin dan menjadi tanggung jawabnya.

Dengan rumusan bahasa Inggris administrator menjalankan atau melakukan "overall management of the organization". Dengan demikian, maka administrator dalam menjalankan administrasi terhadap organisasi usaha menghadapi lima bidang permasalahan.

1. Pengurusan, (filsafat, strategi, policy, peraturan dan rencana dasar).
2. Organisasi, (struktural dan operasional).
3. Informasi, (sistem informasi atau planning, inteligensi, tata usaha, tata buku, inventaris, sistem informasi manajemen).
4. Manajemen (sistem, struktur, gaya, teknologi, managership).
5. Operasi, (operasi staff, operasi lini, operasi teknis, operasi karya) ". ✓

Drs. Soekarno K, dalam bukunya Dasar-Dasar Management (1982 : 13) mengatakan "administrator adalah orang-orang yang menentukan dan mempertahankan tujuan, atau menetapkan policy (kebijaksanaan).

Dengan melihat beberapa pengertian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa administrator adalah orang yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang mengkoordinir berbagai macam kegiatan dalam bentuk kerjasama.

6. Pembangunan dan Pembangunan Desa.

"Bahwa pembangunan itu tiada lain adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan yang dianggap lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu". (Drs. I. Nyoman Beratha, 1982 : 65). Pendapat ini sejalan dengan pidato presiden pada upacara peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 Desember 1974 di Yogyakarta yang berbunyi: ".....Pembangunan pada hakekatnya memang merupakan rangkaian perubahan menuju kemajuan".

Sedangkan menurut Prof. Dr. Songang P. Siagian (1987 : 3) pembangunan didefinisikan sebagai :

"suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)".

Setelah menguraikan beberapa pengertian atau batasan tentang pembangunan, maka sekarang kita mencoba melihat apa yang dimaksud dengan pembangunan desa.

Dalam Surat Keputusan Presiden No.21/ 1984, Bab 26, Huruf B dijelaskan :

"Pembangunan Desa adalah keseluruhan kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa diarahkan untuk memamfaatkan secara optimal potensi sumber daya alam, dan mengembangkan sumber daya manusianya dengan meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan keterampilan, meningkatkan prakarsa, dengan mendapatkan bimbingan dan bantuan dari aparatur pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing" (BN-Marbun,SH, 1988 : 113).

Dengan mengamati defenisi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembangunan Desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh, terpadu dan terkoordinir.
2. Pembangunan Desa mensyaratkan adanya kewajiban bersama yang seimbang dan serasi antara pemerintah dan masyarakat, dalam hubungan ini apabila kewajiban masyarakat dalam bentuk swakarsa dan gotong royong itu belum muncul secara spontan maka prakarsa atau inisiatif perlu ditimbulkan dengan menggunakan teknik yang dapat menggugah dan mendorong masyarakat untuk bekerja dengan penuh semangat dan kesadaran agar pembangunan yang sedang dilaksanakan di desanya dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai.
3. Pembangunan Desa adalah multi sektoral dan merupakan

perpaduan antara program sektoral dengan kebutuhan esensial masyarakat.

B. Dasar dan Tujuan Pembangunan Masyarakat Pedesaan.

1. Landasan Hukum Pembangunan Masyarakat Desa

Pembangunan bangsa di berbagai bidang perlu dan memang sudah ditangani dengan segala kecermatan perencanaan dan keahlian serta ketekunan pelaksanaannya. Hasil-hasil yang dicapai hingga sekarang memang cukup memadai. Namun harus diakui bahwa disamping keberhasilan yang nyata, proses pembangunan kita selama ini telah pula mencatat kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dibidang-bidang tertentu serta akibat-akibat samping yang tak terduga. Maka untuk mengantisipasi kondisi seperti ini dalam gerak pelaksanaan pembangunan, hendaknya tetap mengacu pada landasan hukum pembangunan nasional kita yaitu landasan idiil Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 serta landasan operasionalnya.

a. Landasan Idiil Pancasila.

Setiap usaha pembangunan bangsa seperti yang berlangsung di Indonesia ini memerlukan keikutsertaan setiap warga masyarakat dan seluruh bangsa dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya, ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian dan kemampuannya. Namun semuanya itu tidaklah mencukupi untuk mencapai sasaran jika tidak terdorong dan dituntun oleh pandangan hidup bangsa kita yang luhur yakni Pancasila.

Bangsa Indonesia yang telah memiliki Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara perlu terus menyadari bahwa Pancasila harus tetap menjadi moral perjuangan bangsa kita dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Sebagai moral perjuangan pancasila bukan saja bereperan sebagai nilai pengukur tentang baik buruknya kebijaksanaan serta pelaksanaan pembangunan disegala bidang, akan tetapi juga sebagai nilai pengukur bagi cara dalam melaksanakan pembangunan tersebut. Pancasila sebagai moral perjuangan untuk mencapai sasaran pembangunan perlu diresapi agar menjadi sumber inspirasi perjuangan penggerak dan pendorong dalam pembangunan, pengarah dan sumber cita-cita pembangunan, sumber ketahanan nasional dalam pembangunan dan pembimbing moral pada tingkatan operasional sampai ke unit terkecilpun dalam pembangunan nasional kita.

Oleh karena itulah landasan idiil Pancasila harus mewarnai semua gerak pembangunan desa sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat desa yaitu menaikkan tarap hidup rakyat.

b. Landasan Konstitusional.

Yang menjadi landasan konstitusional Pembangunan Masyarakat Desa, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Berdasarkan atas amanat Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat bertugas antara lain mene-

tapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Maka cita-cita kemerdekaan ditetapkan dalam GBHN yang disebut sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang terdiri atas :

- Pola Dasar Pembangunan Nasional,
- Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang,
- Pola Umum Pembangunan Lima Tahun.

Pola Dasar Pembangunan Nasional pada hakekatnya tidak berubah, karena memuat nilai-nilai dasar yang tetap dan tidak dibatasi oleh kurun waktu. Pola Dasar Pembangunan Nasional menggariskan apa yang menjadi tujuan pembangunan, yang tiada lain adalah penegasan terhadap cita-cita bangsa seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pola Dasar ini pula dinyatakan bahwa Pembangunan Nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

2. Tujuan Pembangunan Masyarakat Desa

Berbicara mengenai tujuan pembangunan masyarakat desa tidak terpisahkan dengan tujuan pembangunan nasional karena pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, maka pembangunan desa yang dilakukan harus meliputi keseluruhan aspek pembangunan, yaitu pembangunan jasmani yang serasi, sejaras dan seimbang dengan pembangunan rohaniah.

Dengan penyelenggaraan pembangunan desa secara menyeluruh diharapkan tujuan pembangunan nasional lebih cepat tercapai, hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat atau

penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Namun karena keterbatasan pemerintah untuk sekaligus membangun desa-desa di seluruh Indonesia maka pemerintah berusaha mendorong masyarakat pedesaan agar mampu membangun dirinya.

Pada dasarnya tujuan pokok pembangunan masyarakat desa dibagi atas :

1. Tujuan jangka pendek yang merupakan tujuan sementara.
2. Tujuan jangka panjang.

Yang menjadi tujuan jangka pendek adalah meningkatkan taraf hidup rakyat di desa-desa untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupannya sehari-hari, ini berarti menciptakan situasi dan kondisi yang lebih mantap, serta memberikan kekuatan dan kemampuan kepada desa dan masyarakatnya dalam suatu tingkat yang lebih kuat, kokoh dan nyata untuk menjadi dasar dan landasan bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Adapun yang menjadi tujuan jangka panjangnya ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungannya dengan sasaran antara pembangunan desa ditujukan untuk menaikkan produksi yang potensial, yang dimiliki oleh desa dan masyarakatnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangkaian pembangunan ekonomi sesuai dengan rencana tahap-tahap pembangunan lima tahun. Kegiatan dan tindakan yang lebih terarah seperti tersebut diatas akan dapat mewujudkan pula nilai-nilai ekonomisnya.

Selanjutnya dengan berdasarkan pada Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa, maka pembangunan masyarakat desa mempunyai dua sasaran yaitu :

1. sasaran strategis, adalah pada bidang atau unit terendah dan diseluruh Indonesia
2. sasaran Aspek atau sasaran bidang meliputi aspek mental spritual dan sosial kulturil maupun aspek fisik materilil ekonomi.

Dengan perpedoman pada sasaran strategis tersebut jelas bahwa yang menjadi sasaran strategis pembangunan desa adalah desa-desa yang merupakan bagian terbesar dari seluruh wilayah Indonesia, dimana kondisi masyarakatnya masih dalam keadaan tingkat hidup dan kehidupan rendah.

Adapun yang menjadi sasaran aspek atau bidang Pembangunan Masyarakat Desa meliputi:

- a. Aspek mental sprituil kulturil meliputi mental, agama, pendidikan, kebudayaan nasional, kesehatan dan sebagainya.
- b. Aspek fisik atau materil atau ekonomi meliputi usaha peningkatan produksi, pemasaran, prasarana ekonomi, perkreditan desa, lapangan kerja dan sebagainya.

Disamping kedua aspek tersebut dalam pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan masyarakat Desa disebutkan pula adanya aspek pemerintahan dan ketertiban, yaitu untuk memperlancar proses pembangunan masyarakat desa maka perlu adanya

tertib pemerintahan terutama pemerintahan desa sebagai suatu syarat dalam melaksanakan pembangunan menuju tercapainya modernisasi pembangunan masyarakat Desa.

C. Struktur Organisasi dan Tugas Pemerintahan Desa.

Antara struktur dan organisasi, terdapat hubungan yang tak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Jika suatu organisasi tak mempunyai struktur yang jelas maka organisasi tersebut tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

"Struktur adalah kerangka kerjasama atas dasar pembagian kerja dalam organisasi. Pembagian kerja ini menentukan wewenang, tugas dan kegiatan orang-orang dalam kesatuan arah dan tujuan".

(Drs. Soewarno Handyaningrat, 1989 : 18).

Sekarang terlihat bahwa struktur tiada lain adalah rangkaian yang menunjukkan segenap tugas pekerjaan, hubungan antara fungsi dan wewenang serta tanggung jawab tiap-tiap anggota organisasi yang memikul tiap-tiap pekerjaan itu untuk mencapai tujuan organisasi.

Organisasi menurut Oliver Sheldon seperti yang dikutip oleh Drs Sutarto (1989 : 21) diberikan pengertian sebagai berikut:

"Organisation is the process of so combining the work which individuals or groups have to perform with the faculties necessary for its execution that the duties, so formed, provide the best channels for the efficient, systematic, positive, and co-ordinate application of the available effort".

"(Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas, sedemikian rupa, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia)".

Selanjutnya akan kita lihat struktur Organisasi Pemerintahan Desa dan tugas Pemerintah Desa dalam menjalankan roda-roda pemerintahan.

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa, menegaskan:

"pasal 3

1. Pemerintahan Desa terdiri atas:
 - a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa.
2. Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Perangkat Desa.
3. Perangkat Desa terdiri atas
 - a. Sekretariat desa
 - b. Kepala-Kepala Dusun.
4. Susunan Organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Peraturan Daerah yang dimaksud dalam ayat (4) baru berlaku sesudah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang". (Pen.Pustaka Tinta Mas, 1987 : 100-101).

Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 3 ayat 4

UU No.5 th.1979 dikatakan:

"Pedoman Menteri Dalam Negeri mengenai susunan organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa mengatur hal-hal sebagai berikut :

- a. kedudukan, tugas dan fungsi Kepala Desa;
- b. susunan organisasinya;
- c. tatakerja;
- d. dan lain sebagainya.

dengan mengindahkan adat istiadat yang berkembang dan berlaku setempat". (Pen.Pustaka Tinta Mas, 1987:129)

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal (3) Undang - Undang ini maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone telah mengeluarkan suatu peraturan tentang susunan organisasi dan

Perangkat Desa yakni Peraturan Daerah Tingkat II Bone No. 6 Tahun 1981 didalam diktum pertimbangannya disebutkan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan maka dalam rangka pelaksanaan pasal (3) ayat (4) Undang-Undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah Desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1981 tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah desa.

Dalam Pasal (2) PERDA No. 6 Tahun 1981 disebutkan sebagai berikut.:

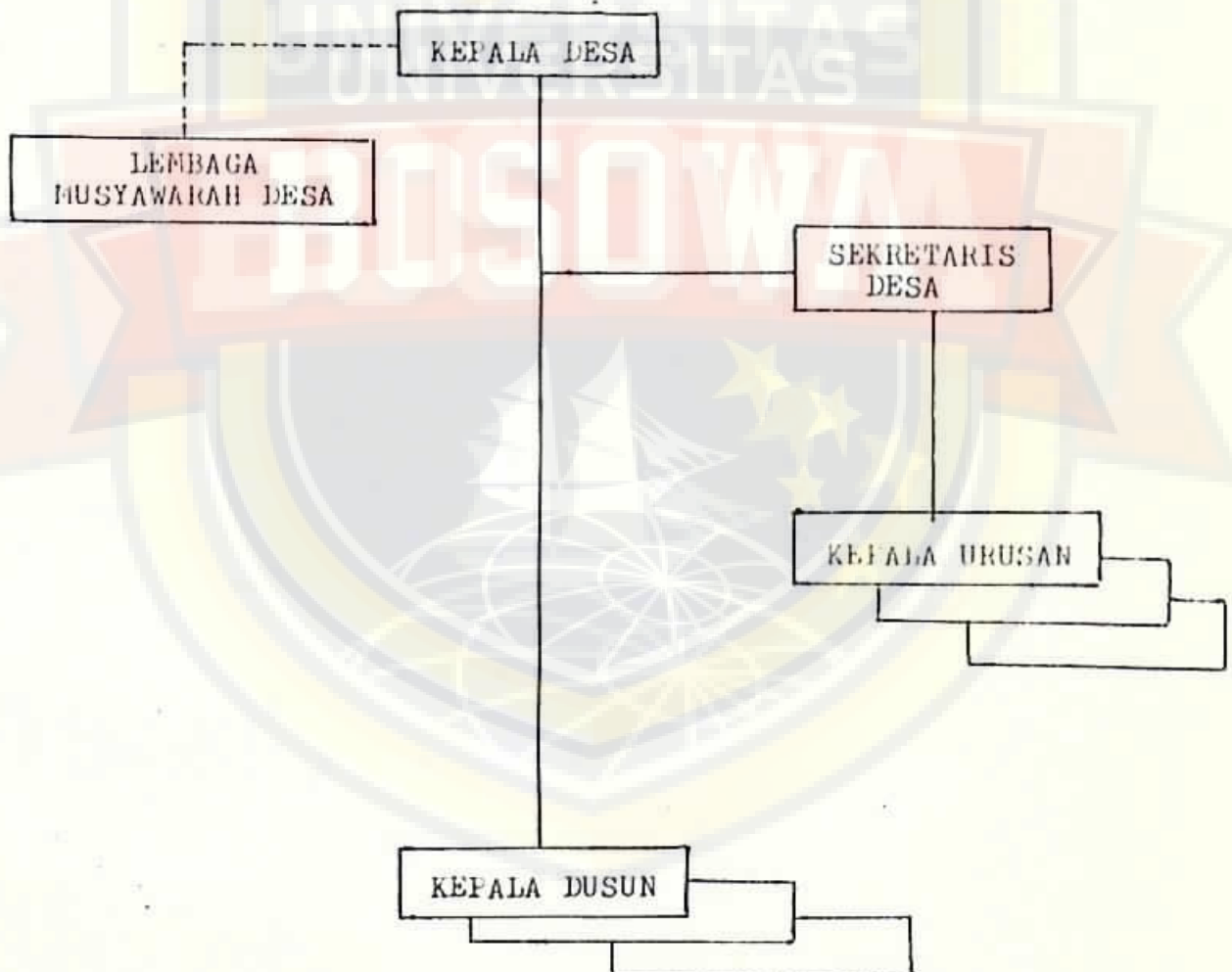
- 1) Susunan organisasi pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa
 - b. Lembaga Musyawarah Desa
 - c. Perangkat Desa
- 2) Susunan organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- 3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c adalah sedikit-dikitnya 9 orang dan sebanyak-banyaknya 15 orang tidak termasuk ketua dan sekretaris.
- 4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Sekretaris Desa
 - b. Kepala-Kepala Urusan
- 5) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa
 - b. Kepala-kepala Urusan
- 6) Jumlah kepala Urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat(5) huruf b terdiri dari sedikit-dikitnya

3(tiga), yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima), yaitu kepala urusan Pemerintahan, kepala urusan Pembangunan, Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

- 7) Bagan susunan Organisasi pemerintahan Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (4) dan (5) sebagai tercantum dalam lampiran peraturan ini" (Lembaran Daerah Kab. Dati. II Bone No. 2. th 1981 : 3 - 5)

Untuk lebih jelasnya digambarkan struktur organisasi dan tatakerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa seperti di bawah ini.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA



b, Tugas Pemerintah Desa

Penyelenggaraan pembangunan desa pada hakekatnya dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan bimbingan, pengarahan, pengawasan, bantuan, dan simultan dari pemerintah sehingga masyarakat mempunyai kemampuan melaksanakan pembangunan sendiri. Inilah prinsip dari ide pembangunan desa yaitu mengadakan perubahan sikap masyarakat desa untuk meningkatkan rasa kesadaran dan rasa tanggung jawab serta kemampuan untuk membangun.

Oleh karena pemerintah adalah sebagai penggerak utama dalam pembangunan, maka jelas mempunyai tugas dan kewajiban yang sangat berat sebab ia harus dapat menggerakkan berbagai faktor yang berkaitan dengan aspek-aspek pembangunan yang dilaksanakan. Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di desa harus mampu untuk dapat membina kerjasama yang baik dari berbagai unsur yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun yang menjadi tugas Kepala Desa sebagai penguasa tertinggi di desa dapat kita lihat pada ketentuan yang dimuat pada pasal (10) UU No.5 Th.1979 yang menjelaskan sebagai berikut :

- "1. Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan Desa.

2. Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yang dimaksud dalam ayat (1) Kepala Desa :
 - a. bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat;
 - b. memberikan keterangan pertanggung jawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa"(Pen.Pustaka Tinta Mas, 1987 : 104 - 105)

Dengan melihat penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa Kepala Desa berhak, berwenang dan berkewajiban menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berpedoman pada peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh daerah yang bersangkutan.

Selain itu Kepala Desa mempunyai tugas untuk menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong, meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas pemerintahan umum yang ada di Desa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

D. Program Pembangunan Pedesaan

Kedudukan Desa dalam pembangunan amat penting karena sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Untuk itu berbagai program dan kebijaksanaan pembangunan telah disusun secara khusus dalam rangka pengembangan daerah pedesaan yang telah dilaksanakan sejak Pelita I sampai dengan tahun kedua Pelita V yang sedang diselenggarakan sekarang ini.

Pembangunan desa yang dilaksanakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah upaya untuk meningkatkan klasifikasi desa menuju ke desa yang berkwalifikasi "Desa Swasembada" secara bertahap. Keadaan desa menurut klasifikasinya dewasa ini adalah sebagai berikut :

- Desa Swadaya : sudah tidak ada
- Desa Swakarya : 98 buah (48 %)
- Desa Swasembada : 105 buah (52 %)

Pada tahun 1990/1991 diusahakan peningkatan desa swakarsa menjadi desa swasembada sebanyak 73 buah atau sekitar 65,77% jumlah desa swakarsa dewasa ini.

Dalam rangka pembangunan desa tersebut, untuk tahun 1990/1991 direncanakan kegiatan-kegiatan dengan target sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bulan bakti IKMD serta pembinaan PKK dan P2WKSS;
2. Penataan lingkungan pemukiman melalui program pemugaran rumah dan lingkungan pedesaan serta program restlement yang mencakup areal 1.190 ha dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 955 KK yang tersebar disembilan Kecamatan.
3. Pembinaan Administrasi Desa dan sistem perencanaan melalui IKMD dan UDKP.

Demikianlah Rencana Pembangunan Desa yang penulis kutip dari buku Rencana Umum Pembangunan Tahunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Tahun Anggaran 1990/1991 (Tahun kedua Repelita Lima) pada halaman 39.

E. Fungsi Dan Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan.

Dalam penjelasan Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dijelaskan :

"Kepala Wilayah dalam semua tingkat sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah Penguasa Tunggal di bidang pemerintahan di daerah, kecuali bidang pertahanan dan keamanan, bidang peradilan, bidang luar negeri dan bidang moneter dalam arti mencetak uang, menentukan nilai mata uang dan sebagainya.

Ia berkewajiban untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Dengan perkataan lain, Penguasa Tunggal adalah Administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan dan Administrator Kemasyarakatan".

Kepala desa sebagai Kepala Wilayah yang berpusat di desa, dalam hubungan ini menunjukkan bahwa Kepala Desa sekaligus merupakan Penguasa Tunggal di desa; atau dengan kata lain Kepala Desa mempunyai fungsi dan peranan sebagai administrator Pemerintahan, Administrator Pembangunan, dan Administrator Kemasyarakatan.

1. Kepala Desa sebagai Administrator Pemerintahan.

Sebagai Administrator Pemerintahan, maka Kepala Desa adalah orang yang mengendalikan dan mengatur pemerintahan di desa, yang antara lain :

- a. Mengatur tentang perbaikan administrasi pada tingkat pedesaan.
- b. Perbaikan serta meningkatkan mutu aparatur pemerintahan di desa.
- c. Melaksanakan, mengamankan dan mengawasi segala kebijaksanaan pemerintah tingkat atasnya yang ada di desa.

- d. Mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin kelancaran pemerintahan di desa.
- e. Melaksanakan tugas pemerintahan yang tak termasuk dalam tugas sesuatu instansi lainnya.

2. Kepala Desa Sebagai Administrator Pembangunan.

Sebagai Administrator Pembangunan, maka Kepala Desa adalah orang yang mengatur dan mengendalikan pembangunan di desa yang antara lain berfungsi :

- a. Sebagai pengendali terhadap pengumpulan data di desa yang kontinyu dan up to date dalam rangka penyusunan perencanaan baik regional, sektoral maupun nasional.
- b. Sebagai pengendali terhadap penyusunan perencanaan di desa yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga desa seperti LKMD, LMD, KUD dan lain sebagainya; untuk menjamin keserasian antara rencana pada tingkat desa dengan rencana dari berbagai program sektoral, regional dan nasional.
- c. Mengendalikan pelaksanaan rencana pembangunan di desa, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Memanfaatkan bantuan-bantuan desa secara efisien dan efektif.
- e. Membangkitkan swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- f. Mengendalikan penyusunan laporan serta mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan,
- g. Membuat inventarisasi masalah di desa dan mencari jalan keluarnya.

3. Kepala Desa Sebagai Administrator Kemasyarakatan.

Sebagai Administrator Kemasyarakatan, maka Kepala Desa adalah orang yang mengendalikan dan mengatur terhadap pembinaan di dalam masyarakat desa yang antara lain berfungsi :

- a. Mengadakan pembinaan terhadap lembaga-lembaga masyarakat seperti LKMD, IMD, KUD, BUD dan lembaga lainnya.
- b. Pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di desa.
- c. Pembinaan atas sistem kekeluargaan dan semangat gotongroyong masyarakat.
- d. Membina pemuda-pemuda di desa dan kepramukaan serta kegiatan-kegiatan non formal.
- e. Membina dan mengadakan kaderisasi kepemimpinan desa.
- f. Pembinaan terhadap pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.
- g. Pembinaan terhadap hasil-hasil kebudayaan masyarakat desa.
- h. Dan lain-lain pembinaan kemasyarakatan.

Dengan melihat peranan Kepala Desa sebagai Administrator Pembangunan, maka dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa sebagai Penguasa Tunggal di desa merupakan sumber inovasi bagi pembinaan, gagasan, dan strategi yang menunjang pembangunan dan pembaharuan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI

A. Keadaan Geografis Desa Selli.

Sebelum penulis mengemukakan keadaan geografis Desa Selli, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang pengertian geografi agar mempermudah penjelasan berikutnya. Drs.H.M.Thala memberi pengertian geografi sebagai berikut : "Geografi adalah ilmu yang mempelajari permukaan bumi dan penduduknya, serta hubungan antar keduanya, atau lebih singkat lagi : ilmu yang mempelajari tentang bumi". (Drs.H.M.Thala; 1989 : 1). Berdasarkan pengertian diatas maka penulis akan mengemukakan keadaan geografis Desa Selli sebagai berikut :

Desa Selli adalah salah satu dari dua belas buah desa yang ada di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Dimana Desa Selli ini berada di daerah datar dengan ketinggian 500 meter dari permukaan air laut yang merupakan tempat perkebunan dari masyarakat desa dan sekaligus merupakan tempat perkampungan dan persawahan.

Luas Desa Selli 3492 Ha, terdiri dari sawah, pekarangan, ladaang dan perumputan serta jalan raya dan lain-lain. Desa Selli terdiri dari tiga dusun :

1. Dusun Pammase : 1487 Ha.
2. Dusun Nyappareng: 525 Ha.
3. Dusun Libureng : 1480 Ha.

Secara administratif, desa ini berada didalam wilayah Kecamatan Lappariaja Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. Desa ini diapit oleh tiga desa dan sat kecamatan dengan perincian batas-batasnya sebagai berikut :

1. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Bengo.
2. Disebelah selatan berbatasan dengan Desa Tungke.
3. Disebelah timur berbatasan dengan Desa Tungke dan Bengo.
4. Disebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Lamuru.

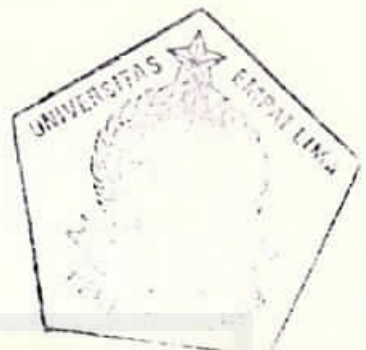
Dari perincian tersebut terlihat bahwa Desa Selli menduduki tempat yang strategis dalam hal penyaluran dari berbagai hasil produksi yang ada, begitu pula untuk mendapat - kan berbagai macam kebutuhan. Desa Selli juga dilalui oleh jalan propinsi yaitu poros Ujung Pandang - Bone.

B. Keadaan Penduduk dan Perekonomian Desa Selli.

1. Keadaan Penduduk.

Penduduk merupakan masalah yang sangat penting dan sangat mendesak dilakukan pemecahannya sehingga menuntut untuk segera dilaksanakan pembangunan baik fisik maupun non fisik. Pertumbuhan dan penyebaran penduduk yang tidak seimbang amat mempengaruhi bagi usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengenai penduduk Desa Selli secara keseluruhan berjumlah 4023 jiwa, dengan perincian sebagai berikut :



1. Dusun Pammase : 1689 orang.
2. Dusun Nyappareng : 795 orang.
3. Dusun Libureng : 1539 orang.

Penduduk Desa Selli seluruhnya adalah suku bugis. Bahasa yang dipakai oleh masyarakat adalah Bahasa Bugis disamping menggunakan Bahasa Indonesia.

Selanjutnya disini akan dikemukakan perincian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, mata pencaharian dan sebagainya.

a. Perincian penduduk berdasarkan tingkat pendidikan :

1. Buta huruf Latin : 409 orang.
2. Sekolah Dasar : 1460 orang.
3. SLTP : 54 orang.
4. Mahasiswa : 7 orang.
5. Sarjana : 3 orang.
6. Drop Out : 254 orang.

jumlah : 2187 orang.

b. Perincian penduduk berdasarkan mata pencaharian :

1. Petani : 1113 orang.
2. Buruh : 21 orang.
3. Pegawai Negeri : 28 orang.
4. A B R I : 2 orang.
5. Tukang : 19 orang.
6. Pedagang ; 38 orang.

7. Jual-jualan : 42 orang.

8. Purnawirawan ABRI/

Pensiunan PNS : 23 orang.

9. Sopir oto : 21 orang.

jumlah : 1287 orang.

3. Kelompok Umur Sekolah :

a. Laki-laki :

1. Umur 7 - 13 tahun : 498 orang.

2. Umur 14 - 16 tahun : 101 orang.

3. Umur 17 - 20 tahun : 104 orang.

jumlah : 703 orang.

b. Perempuan :

1. Umur 7 - 13 tahun : 445 orang.

2. Umur 14 - 16 tahun : 110 orang.

3. Umur 17 - 20 tahun : 138 orang.

Jumlah : 693 orang.

Jumlah keseluruhan kelompok umur sekolah laki-laki dan perempuan di Desa Selli sebanyak 1396 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja sebanyak 1287 orang. (sumber : kantor Desa Selli).

Dari kedua perincian di atas, yaitu penduduk dari tingkat umur sekolah 1396 orang dan tenaga kerja sebanyak 1287 orang, maka terlihat bahwa penduduk yang mempunyai kegiatan yang bersifat aktif sebanyak 2683 orang, dengan kata lain 66,69 % penduduk yang produktif.

b. Keadaan Perekonomian.

Seperti telah dikemukakan bahwa Desa Selli adalah merupakan daerah pertanian, maka produksi yang dihasilkan di desa ini terutama berasal dari sektor pertanian. Peningkatan produksi dibidang ini hanya dapat dicapai, bilamana penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini dapat merubah cara-cara pengolahannya yang masih bersifat tradisional menjadi cara pengolahan yang bersifat modern. Dan untuk Desa Selli masyarakat dalam mengolah pertanian sudah melakukan pengolahan yang intensif dan modern. Maka jelaslah bahwa mata pencaharian atau perekonomian Desa Selli pada umumnya adalah dari sektor pertanian.

Dalam hubungan ini penulis akan mengemukakan potensi-potensi ekonomi yang ada di Desa Selli sebagai sumber perekonomian.

a. Pertanian.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa Desa Selli adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Lappariaja yang merupakan daerah datar yang mempunyai persawahan kurang lebih 1390 Ha.

Sedangkan luas ladang adalah \pm 1208 Ha yang berarti untuk areal pertanian yang ada di Desa Selli sekitar 2598 Ha, yang berarti sekitar 74 % dari luas daerah keseluruhan. Sedangkan luas areal selebihnya meliputi pekarangan, jalan raya, tanah kosong dan lain-lain.

Melihat luasnya areal pertanian yang ada di desa ini, kira-kira cukup memungkinkan bagi pemerintah Desa Selli untuk mengolah dan mendapatkan dana-dana pembangunan dari hasil pertanian tersebut.

Disamping itu memungkinkan pula bagi masyarakat untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan mereka dan selanjutnya pembagian hasil dapat disumbangkan untuk pembangunan.

b. Sarana Ekonomi.

Sarana ekonomi yang ada di Desa Selli adalah kios-kios. Sedangkan pasar yang merupakan salah satu sarana ekonomi yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat desa tidak terdapat di desa ini.

Namun demikian, karena arus transportasi sangat lancar maka penduduk dalam memasarkan hasil pertanian mereka, mereka dapat memasarkan di pasar-pasar desa yang ada di desa lain yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Desa Selli.

C. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Desa Selli.

Pembangunan masyarakat desa pada dasarnya diharapkan berasal dari swadaya masyarakat itu sendiri, Swadaya itu harus

ditumbuhkan dan dibina sebaik-baiknya. Dengan demikian pemba -
ngunan masyarakat benar-benar dilaksanakan dengan intensif, ke-
mauan dan kekuatan serta usaha dari masyarakat itu sendiri,
sedang pemerintah berkewajiban memberikan bantuan untuk mendo-
rong guna meningkatkan swadaya masyarakat agar swadaya itu be-
nar-benar nyata nyata dikalangan masyarakat dan dapat dimam -
faatkan untuk usaha pembangunan bagi kepentingan masyarakat
atas bimbingan dan fasilitas dari pemerintah, terhadap usaha
pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan masyarakat
desa itu, maka masyarakat harus diikut sertakan untuk memberi-
kan partisipasi yang sebesar-besarnya, se hingga antara masya-
rakat dan pemerintah terdapat kerjasama yang sebaik-baiknya.

Dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa harus di-
himpun kerjasama dan koordinasi yang sebaik-baiknya. Dengan
demikian dapat pula diwujudkan suatu kesatuan yang bulat dan
efisien dari gerak pembangunan yang meliputi berbagai bidang
itu.

Sehubungan dengan topik pembahasan ini, difokuskan pada
wilayah desa, maka untuk terlaksananya pembangunan desa dengan
baik, maka pemerintah desa perlu mengambil berbagai langkah
kebijaksanaan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Kepala Desa sebagai
kepala pemerintahan di wilayah desa yang luas dan kompleks ma-
ka tidak mungkin dibahas secara mendetail dan menyeluruh.

Sekalipun demikian untuk sekedar memberikan gambaran, maka berikut ini akan dikemukakan beberapa langkah kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah Desa Selli dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa Selli sesuai dengan tugas dan wewenangya.

Untuk itu, maka pemerintah Desa Selli dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desanya menempuh langkah-langkah kebijaksanaan dalam mengumpulkan dana dengan jalan antara lain memfungsikan lembaga-lembaga yang ada di desa dengan sebaik-baiknya. Adapun cara-cara yang ditempuh oleh pemerintah desa untuk mengumpulkan dana pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pungutan atas jual beli harta, tanah, hewan dan lain - lain sebanyak 2% dari harga jual.
- b. Pemberian Surat Keterangan Cerai / Kawin dikenakan pungutan sebanyak Rp.5.000 ,-
- c. Uang leges sebanyak Rp.1000,- / Surat Keterangan yang dikeluarkan.
- d. Pungutan hasil bumi, padi / palawija sebanyak 3% /Ha.
- e. Pungutan atas penjualan pasir/batu sebanyak Rp.2.500 /truk.
- f. Sangsi pelanggaran hewan liar/ ternak sebanyak Rp.25.000 per ekor.
- f. pengumpulan dan penjualan beras jumputan.

(sumber : Hasil Musyawarah Desa yang dituangkan dalam APFKD).

Tujuan dari pada kebijaksanaan yang ditempuh oleh LMD ini adalah untuk membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan di desadalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian LMD ini menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang program pembangunan pemba - ngunan pemerintah, menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dan menjadi sarana untuk meningkatkan kesejah - teraan rakyat.

Dari kebijaksanaan yang ditempuh ini memungkinkan bagi pemerintah desa untuk mengumpulkan dana-dana dari masyarakat guna pembiayaan program pemerintah pemerintah dalam rangka me- laksanakan pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat.

D. Hasil-Hasil Pembangunan yang Dicapai Desa Selli.

Jalam hubungannya dengan tugas-tugas pokok pembangunan masyarakat desa, maka disini dapat dikemukakan bahwa hasil pe- laksanaan daripada kebijaksanaan pemerintah dibidang pembangun- an masyarakat desa, termasuk bantuan keuangan pemerintah kepa- da desa dalam meningkatkan usaha-usaha gotong royong dan swa- daya masyarakat telah menumbuhkan kegairahan dan semangat membangun dikalangan masyarakat Desa Selli.

Hal ini merupakan unsur optensil yang esensial pada sen- di-sendi kehidupan perekonomian, sehingga memberikan harapan besar bagi penyelenggaraan tahap-tahap pembangunan selanjutnya.

Selanjutnya disini penulis akan mengemukakan hasil-ha- sil pembangunan yang telah dicapai yang bermamfaat bagi masya-

rakat luas , dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun hasil tersebut antara lain :

1. Bidang Pertanian.

Sistem pertanian tradisional mewarnai kehidupan masyarakat sebelum pelaksanaan Pelita, yang mana sistem ini dipengaruhi oleh faktor alam sekitarnya dan fasilitas yang tersedia belum memadai. Pada masa ini masyarakat belum bertani secara menetap, mereka bertani dengan membuka tegalan. Akibat perkebunan liar ini terjadilah penggundulan di sana-sini, penandusan tanah dan sebagainya.

Melihat krisis ini pemerintah melalui Pelita I sampai sekarang ini berusaha mengatur dan menganjurkan untuk bertani yang baik secara menetap seperti membuka sawah dan menanam tanaman lainnya yang membawa mamfaat bagi masyarakat.

Usaha pemerintah di bidang ini ternyata berhasil, dimana terlihat pada saat sekarang ini masyarakat Desa Selli telah memiliki areal persawahan seluas 1390 Ha dan ladang seluas 1208 Ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 01

LUAS AREAL PERTANIAN DI DESA SELLI

No	D u s u n	L u a s . P e r t a n i a n	
		Sawah	Lada ng
1.	Pammase	285 Ha	791 Ha
2.	Nyappareng	15 Ha	360 Ha
3.	Libureng	1090 Ha	57 ha

Sumber : Kantor Desa Selli.

Hasil pengolahan lahan yang dicapai adalah 4875, 74 ton per tahun. Dengan prospek akan kesuburan tanah pertanian di desa ini, maka bagi masyarakat Desa Selli cukup mempunyai peluang atau kesempatan yang besar untuk senantiasa berusaha meningkatkan produksinya agar memperoleh pendapatan yang maksimal. Hal ini dimungkinkan mengingat dengan luas persawahan sebanyak 1390 Ha , 815 Ha diantaranya adalah persawahan dengan sistem pengairan teknis. Pendapatan yang maksimal ini juga berarti semakin besarnya sumbangan yang dapat diberikan oleh masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan. Dan bagi masyarakat Desa Selli hal ini telah dibuktikan dengan dikeluarkannya sumbangan bagi setiap panen yaitu dengan menyetorkan sebagian gabah yang dihasilkan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

2. Bidang Peternakan.

Produksi ternak di desa ini sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri, belum dapat di produksi secara ekonomis yang kontinyu. Akan tetapi kadang kala bilamana ada kebutuhan yang mendadak ternak ini bisa menjadi sebagai penghasil (nilai ekonomis). Pada saat sekarang pemerintah mulai menganjurkan peternakan dengan sistem pengandangan dengan pakan ternak adalah rumput gajah yang penanamannya juga dianjurkan oleh pemerintah kepada petani di pinggir lahan-lahan pertanian mereka. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat senantiasa berusaha untuk mengembangkan ternak ini supaya hasil peternakan tersebut selain dapat memenuhi kebutuhan sendiri juga dapat bernilai ekonomis.

Tabel 02

JENIS-JENIS TERNAK DALAM WILAYAH DESA SELLI

No.!	Jenis Ternak	Banyaknya (ekor)	Pengunaannya
1 !	Kerbau	87	!Konsumsi /membajak
2 !	Sapi	957	!Konsumsi /membajak
3 !	Kuda	49	! Konsumsi/ pe- ! ngangkutan.
4 !	Kambing	107	! Konsumsi.
5.!	Ayam	12575	! Konsumsi.
6.!	Itik	862	! Konsumsi.

Sumber : Kantor Desa Selli.

3. Bidang Irasarana.

a. Pengangkutan (transport)

Usaha-usaha pengangkutan di Desa ini pada umumnya atau boleh dikatakan telah memakai alat pengangkutan modern seperti mobil, motor, sepeda, dan lain sebagainya. Adapun jumlah kendaraan tersebut di Desa Selli adalah sebagai berikut : Mobil : 28 buah, motor 56 buah, sepeda 49 buah, bendi dan gerobak masing-masing 6 dan 7 buah. Dengan jumlah yang seperti itu bagi masyarakat Desa Selli cukup memberikan kelancaran dalam usaha rakyat untuk memasarkan hasil-hasil yang diperoleh.

b. Rehabilitasi/pembuatan jalur jalan.

Mengenai jalur jalan di Desa ini terdiri dari jalur jalan propinsi sepanjang 4 kilo meter, sedangkan jalur jalan yang lain adalah jalan-jalan poros yang menghubungkan dusun yang satu dengan dusun yang lain.

Jalan Desa ini sepanjang 2,5 km telah diperkeras sedangkan 15 km km masih merupakan jalan tanah. Dengan demikian panjang jalan di wilayah Desa Selli adalah 21,5 kilo meter. Jembatan 2 buah dengan panjang keseluruhan 19 meter.

Jalan ini dibangun dan direhabilitir secara bertahap mengingat faktor keadaan masyarakat yang tidak mempunyai kesempatan yang sama, dalam hal ini pembuatannya secara gotong royong kecuali jalan propinsi sepanjang 4 km. walaupun kondisi jalan sebagian besar belum diaspal namun cukup memberi kelancaran bagi usaha pengangkutan hasil-hasil dari Desa Selli untuk dipasarkan di desa lain, begitu pula dalam memasukan bahan-bahan kebutuhan masyarakat.

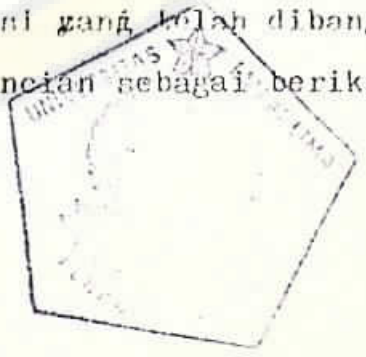
c. Pendidikan

Di wilayah ini untuk keperluan sarana pendidikan 2 (dua) buah Sekolah Dasar 1 buah dibangun melalui swadaya masyarakat, dan 1 buah lagi dibangun dengan bantuan pemerintah (inpres), tenaga pengajar untuk kedua sekolah ini sebanyak 17 orang.

Keadaan gedung atau bangunan dari kedua sekolah ini cukup baik karena keduanya adalah bangunan yang permanen.

d. Pengairan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Petugas pertanian, Pemerintah dan masyarakat serta kenyataan yang ada di lapangan di Desa Selli ini terdapat irigasi yang telah dibangun sepanjang 49,5 kilo meter dengan perincian sebagai berikut :



- Irigasi Primer ; 7 km.
- Irigasi sekunder : 11 km.
- Irigasi tersier : 14 km.
- Irigasi kuerter : 16 km.
- Irigasi drainase : 1,5 km.

Irigasi ini dapat mengairi sawah seluas 815 Ha, selebihnya adalah sawah-sawah dengan pengairan tadah hujan. Dengan demikian sawah-sawah yang dapat diolah dua kali setahun hanyalah yang dapat diairi oleh pengairan desa tersebut. Sedangkan sawah lainnya hanya sekali panen dalam setahun/

e. Agama.

Seperti diketahui bahwa pembangunan Nasional bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, baik materil maupun sprituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian pembangunan itu bukan hanya dilaksanakan dibidang materil saja semata-mata melainkan juga meliputi pembangunan mental sprituil atau dibidang rohaniannya yang diwujudkan melalui agama yang dianut oleh masing-masing penduduk.

Dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Dengan berdasarkan pada pasal tersebut diatas dan diperhadapkan pada kehidupan beragama di Desa Selli maka akan nampak bahwa masyarakat Desa Selli telah melaksanakan sebagaimana yang

diinginkan oleh pasal 29 ayat (2) tersebut, yaitu dengan memeluk salah satu agama yang ada di Indonesia. Dari sebanyak 4023 penduduk Desa Selli kesemuanya memeluk agama Islam.

Sebagai bukti nyata yang dapat menunjukkan adanya peningkatan dibidang keagamaan ini di Desa Selli terdapat 3 buah masjid yang terdapat di tiap dusun dengan konstruksi permanen, yang kesemuanya adalah hasil swadaya dari masyarakat.

Dengan hasil pembangunan masjid tersebut menunjukkan kepada kita betapa besar perhatian masyarakat Desa Selli terhadap pembinaan dan pengembangan agama (Islam) yang merupakan anutan mereka.



BAB IV

REALISASI PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI ADMINISTRATOR PEMBANGUNAN

A. Peranan Kepala Desa Selli dalam Melaksanakan Fungsinya.

Untuk mengetahui bagaimana peranan Kepala Desa Selli dalam melaksanakan fungsinya sebagai administrator pembangunan memang dirasa tidak cukup kita melihat hanya pada pelaksanaan pembangunan di Desa Selli sendiri, justru yang terasa penting adalah bagaimana pengakuan pemerintah, Tokoh Masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Untuk mendapatkan jawaban dari ketiga komponen tersebut penulis mencoba memberikan alternatif pertanyaan kepadanya, untuk jelasnya akan diuraikan dibawah ini :

1. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data.
2. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa.
3. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan Desa.
5. Peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan.
6. Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat.
7. Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi.

1. Peranan Kepala Desa Selli sebagai Pengendali dan Pengumpul Data.

Data sangat dibutuhkan dalam rangka pembangunan, terutama yang menyangkut alokasi program pembangunan yang direncanakan di desa. Olehnya itu Kepala Desa diharap mampu mengendalikan dan menumpulkan data yang dibutuhkan. Peranan Kepala Desa Selli dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 03

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI DAN PENGUMPUL DATA MENURUT PEMERINTAH

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	2	22,22 %
Berperanan	4	44,44 %
Netral	3	33,33 %
Tidak berperanan	-	-
Sangat tidak berperanan	-	-
Jumlah :	9	100,00 %

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data menurut pemerintah tertinggi adalah berperanan (44,44%), kemudian netral (33,33%) dan sangat tidak berperanan (22,22%). Dengan demikian melihat dari segi pengakuan pemerintah di atas jelas bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli adalah berperanan.

Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat berpendapat bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam melaksanakan perannya sebagai pengendali dan pengumpul data adalah sangat berperanan 20 %, berperanan 40 %, netral 20 %, tidak berperanan 20 %, dan sangat tidak berperanan tidak ada. Pendapat Tokoh Masyarakat tersebut, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 04
PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI DAN PENGUMPUL
DATA MENURUT TOKOH MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berperanan	1	20 %
Berperanan	2	40 %
N e t r a l	1	20 %
Tidak Berperanan	1	20 %
Sangat Tidak Berperanan	-	-
	5	100 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Sedangkan menurut pendapat masyarakat yang dikumpulkan penulis tentang peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data dapat dilihat pada tabel 05 berikut ini.

Tabel 05

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI DAN PENGUMPUL
DATA MENURUT MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	3	5,00 %
Berperanan	36	60,00 %
N e t r a l	12	20,00 %
Tidak berperanan	7	11,67 %
Sangat tidak berperanan	2	3,33 %
J u m l a h	60	100,00 %

Sumber : Hasil data lapangan 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa menurut pendapat masyarakat tentang peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data adalah : sangat berperanan 5 %, berperanan 60 %, netral 20 %, tidak berperanan 11,67 %, dan sangat tidak berperanan 3,33 %. Untuk jelasnya dapat dilihat sebaran menurut responden pada tabel berikut :

Tabel 06

SEBARAN MENURUT RESPONDEN DAN PERANAN KEPALA DESA SELLI
SEBAGAI PENGENDALI DAN PENGUMPUL DATA

Responden	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data									
	SB	%	B	%	N	%	TB	%	STB	%
Pemerintah	2	22,22	4	44,44	3	33,33	-	-	-	-
T. Masy.	1	20,00	2	40,00	1	10,00	1	10,00	-	-
Masyarakat	3	05,00	36	60,00	12	20,00	7	11,67	2	3,33
J u m l a h	6		42		16		8		2	

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat peranan Kepala Desa menurut sebarannya adalah sangat berperanan 6, Berperanan 42, netral 16, tidak berperanan 8, sangat tidak berperanan 2.

2. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap rencana desa.

Penyusunan rencana Desa sangat berkaitan dengan peranan Kepala Desa dalam mengendalikan dan mengumpulkan data, sebab penyusunan rencana yang baik harus ditunjang oleh data-data yang akurat. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun rencana desa akan kita lihat dari pendapat pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat itu sendiri seperti terlihat dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 07

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA DESA

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berperanan	1	11,11 %
Berperanan	3	33,33 %
Netral	3	33,33 %
Tidak Berperanan	2	22,22 %
Sangat Tidak Berperanan	-	-
Jumlah :	9	100,00 %

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari data di atas terlihat bahwa peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa menurut pemerintah adalah berperanan dan netral masing-masing 33,33 %, kemudian tidak berperanan 22,22 %, sangat berperanan 11,11 %, sedangkan sangat tidak berperanan tidak ada. Dengan demikian tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam hal ini adalah berperanan. Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 08

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA DESA MENURUT TOKOH MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berperanan	1	20 %
Berperanan	1	20 %
Netral	2	40 %
Tidak berperanan	1	20 %
Sangat tidak berperanan	-	-
Jumlah :	5	100 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana Desa menurut tokoh Masyarakat adalah sangat berperanan 20 %, berperanan 20 %, netral 40 %, tidak berperanan 20 % dan sangat tidak berperanan tidak ada.

Mengenai pendapat masyarakat tentang peranan Kepala Desa Selli dalam mengendalikan dan menyusun rencana desa dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 09

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MENGENDALIKAN DAN MENYUSUN
RENCANA DESA MENURUT MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	6	10,00 %
Berperanan	29	48,33 %
N e t r a l	16	26,67 %
Tidak berperanan	7	11,67 %
Sangat tidak berperanan	2	3,33 %
J u m l a h :	60	100,00 %

Sumber Data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam mengendalikan dan menyusun rencana desa yang tertinggi adalah berperanan 48,33 %, netral 26,67 %, tidak berperanan 11,67 %, sangat berperanan 10 % dan terakhir sangat tidak berperanan 3,33 %. Dengan demikian tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam mengendalikan dan menyusun rencana desa adalah berperanan.

Secara keseluruhan dari ketiga kelompok responden dalam penilaiannya pada tingkat peranan yang dimainkan oleh Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 10

SEBARAN MENURUT RESPONDEN DAN PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI TERHADAP PENYUSUNAN RENCANA DESA.

Responden	! Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa									
	! SB	%	B	%	N	%	TB	%	STB	%
Pemerintah	1	11,11	3	33,33	3	33,33	2	22,22	-	-
T. Masy.	1	20,00	1	20,00	2	40,00	1	20,00	-	-
Masyarakat	6		29	48,33	16	26,67	7	11,67	2	3,33
Jumlah	8		33		21		10		2	

Sumber : Hasil data lapangan 1991 dan diolah oleh penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli menurut ketiga kelompok responden adalah sebagai berikut : sangat berperanan 8, berperanan 33, netral 21, tidak berperanan 10, dan sangat tidak berperanan 2.

3. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan.

Rencana yang telah disusun dengan baik akan terlaksana bila ditunjang dengan koordinasi dan kerjasama antara lembaga sosial dan gotong royong masyarakat. Berfungsinya secara efektif hal ini sangat ditentukan oleh peranan Kepala Desa sebagai penguasa tunggal di desa. Tentang Peranan Kepala Desa Selli dalam memainkan peran ini dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 11

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN MENURUT PEMERINTAH

Tingkat peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	2	22,22 %
Bereperanan	3	33,33 %
N e t r a l	2	22,22 %
Tidak berperanan	1	11,11 %
Sangat tidak berperanan	1	11,11 %
J u m l a h :	9	100,00 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan desanya adalah sangat berperanan 22,22 %, berperanan 33,33 %, netral 22,22 %, tidak berperanan 11,11 %, dan sangat tidak berperanan 11,11 %. Dengan demikian bahwa peranan Kepala Desa Selli menurut pemerintah adalah berperanan.

Sedangkan menurut pendapat Tokoh Masyarakat peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan adalah sangat berperanan 40 %, berperanan 20 %, netral 20 %, dan tidak berperanan 20 % serta sangat tidak berperanan tidak ada. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN MENURUT TOKOH MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	2	40 %
Berperanan	1	20 %
N e t r a l	1	20 %
Tidak berperanan	1	20 %
Sangat tidak berperanan	-	-
J u m l a h :	5	100 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Sedangkan menurut pendapat masyarakat tentang peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13

PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN MENURUT MASYARAKAT

Tingkat peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	17	28,33 %
Berperanan	22	36,67 %
N e t r a l	14	23,33 %
Tidak berperanan	4	6,67 %
Sangat tidak berperanan	3	5,00 %
J u m l a h :	60	100,00 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat peranan yang dimainkan oleh Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan adalah : sangat berperanan 28,33 % , berperanan 36,67 % , netral 23,33 % , tidak berperanan 6,67% sangat tidak berperanan 5 %. Dengan demikian bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli adalah berperanan.

Secara keseluruhan dari ketiga kelompok responden dalam penilaiannya terhadap peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14

SEBARAN MENURUT RESPONDEN DAN PERANAN KEPALA DESA SELLI SEBAGAI PENGENDALI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

Responden	Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan											
	Q	SB	%	B	%	N	%	TB	%	STB	%	
Pemerintah	1	2	22,22	3	33,33	2	22,22	1	11,11	1	11,11	
T. Masy.	1	2	40,00	1	20,00	1	20,00	1	20,00	-	-	
Masyarakat	1	17	28,33	22	36,67	14	23,33	4	6,67	3	5,00	
Jumlah	12	1		26		17		6		4		

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis .

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan desa adalah : berperanan 26, sangat berperanan 21, netral 17, Tidak berperanan 6 dan sangat tidak berperanan 4.

4. Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan Desa.

Bantuan-bantuan yang dimaksud adalah segala bantuan yang diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah Tingkat I, maupun Pemerintah Tingkat II serta proyek-proyek Inptes yang diberikan dari pusat. Untuk menyelesaikan keseluruhan sektor ini adalah sangat di butuhkan Peranan Kepala Desa. Dan untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari pendapat pemerintah, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri seperti yang terlihat di bawah ini :

Tabel 15

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMAMFAATKAN BANTUAN-BANTUAN DESA MENURUT PEMERINTAH.

Tingkat Peranan	Frekuensi	prosentase
Sangat berperanan	1	11,11 %
Berperanan	3	33,33 %
N e t r a l	4	44,44 %
Tidak berperanan	1	11,11 %
Sangat tidak berperanan	-	-
J u m l a h :	9	100,00 %

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel diatas diketahui bahwa peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa adalah cukup berperanan. Hal mana dapat dilihat dari pendapat pemerintah yaitu

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat peranan tertinggi yang dijalankan oleh Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa menurut ketiga kelompok responden secara keseluruhan adalah : berperanan 23, netral 20, sangat berperanan 11 dan tidak berperanan dan sangat tidak berperanan masing-masing 10. Dengan demikian tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa adalah cukup berperanan.

5. Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat.

Swadaya masyarakat memegang peranan penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa. Sebab bagaimana pun juga masyarakat dan pemerintah desa tak dapat terus-menerus mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang dirasa makin mendesak pelaksanaannya. Swadaya masyarakat dan partisipasi masyarakat dapat nampak apabila Kepala Desa aktif untuk senantiasa membangkitkannya. Untuk mengetahui hal ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 19

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMBANGKITKAN SWADAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENURUT PEMERINTAH

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	3	33,33 %
Berperanan	2	22,22 %
Netral	2	22,22 %
Tidak berperanan	1	11,11 %
Sangat tidak berperanan	1	11,11 %
J u m l a h	9	100,00 %

Sumber : Hasil data lapangan yang diolah penulis tahun 1991.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut pemerintah adalah sangat berperanan 33,33 % berperanan 22,22 %, netral 22,22 %, dan tidak berperanan 11,11 % serta sangat tidak berperanan 11,11 %. Dengan demikian menurut pemerintah tingkat peranan yang dimainkan Kepala Desa Selli dalam hal ini adalah sangat berperanan. Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 20

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMBANGKITKAN SWADAYA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENURUT TOKOH MASYARAKAT

Tingkat peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	2	40 %
Berperanan	-	-
N e t r a l	3	60 %
Tidak berperanan	-	-
Sangat tidak berperanan	-	-
J u m l a h :	5	100 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut Tokoh Masyarakat adalah sangat berperanan 40 %, netral 60 %. Jadi dengan demikian peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat berdasarkan tabel diatas adalah cukup berperanan.

Kemudian mengenai pendapat masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 21

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMBANGKITKAN SWADAYA
DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MENURUT MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	24	40,00 %
Berperanan	13	21,67 %
N e t r a l	6	10,00 %
Tidak berperanan	11	18,33 %
Sangat tidak berperanan	6	10,00 %
J u m l a h : 60		100,00 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat peranan tertinggi yang dimainkan oleh Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut masyarakat itu sendiri adalah sangat berperanan 40 %, kemudian berperanan 21,67 %, setelah itu tidak berperanan 18,33 % dan terakhir adalah netral dan sangat tidak berperanan membagi angka sama yaitu 10%. Dengan demikian tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam hal ini adalah sangat berperanan.

Bila kita akan melihat sebaran menurut ketiga kelompok responden tentang hal ini maka akan terlihat sebagai berikut.

Tabel 22

SEBARAN MENURUT RESPONDEN DAN PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMBANGKITKAN PARTISIPASI DAN SWADAYA MASYARAKAT.

Responden	! Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat.										
	! SB	%	B	%	N	%	TB	%	STB	%	
Pemerintah	! 3	33,33	2	22,22	2	22,22	1	11,11	1	11,11	
T. Masy.	! 2	40,00	-	-	3	60,00	-	-	-	-	
Masyarakat	! 24	40,00	13	21,67	6	10,00	11	18,33	6	10,00	
	29		15		11		12		7		

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat menurut ketiga kelompok responden secara keseluruhan adalah : Sangat berperanan 29. berperanan 15, netral 11 dan tidak berperanan 12, serta sangat tidak berperanan 7. Dengan demikian tingkat peranan yang dimainkan oleh Kepala Desa Selli dalam hal ini adalah sangat berperanan.

6. Peranan Kepala Desa Selli dalam Menyusun Laporan.

Untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya diperlukan pelaporan. Pelaporan ini dibuat oleh Kepala Desa di bantu oleh sekretaris desa atau instansi vertikal yang berada di atasnya (camat).

Adapun mengenai peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan pertanggung jawaban ini dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 23
PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MENYUSUN LAPORAN
MENURUT PEMERINTAH

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berperanan	2	22,22 %
Berperanan	1	11,11 %
Netral	4	44,44 %
tidak berperanan	2	22,22 %
Sangat tidak berperanan	-	-
J u m l a h :	9	100,00 %

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa : Sangat berperanan 22,22 % , berperanan 11,11 % , netral 44,44 % , tidak berperanan 22,22 % . Demikian menurut pendapat pemerintah mengenai peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan. Sedang menurut Tokoh Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 24

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MENYUSUN LAPORAN
MENURUT TOKOH MASYARAKAT

Tingkat peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berperanan	-	-
Berperanan	2	40 %
N e t r a l	2	40 %
Tidak berperanan	1	20 %
Sangat Tidak berperanan	-	-
J u m l a h :	5	100 %

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Malau kita perhatikan tabel diatas maka terlihat bahwa menurut Tokoh Masyarakat tingkat peranan yang nampak adalah cukup berperanan, hal mana dari 5 Tokoh Masyarakat 2 orang diantaranya memberi jawaban berperanan, netral juga 2 orang sedangkan hanya 1 orang yang memberi jawaban tidak berperanan. Dengan demikian peranan Kepala Desa Selli dalam hal ini adacukup berperanan.

Sekarang akan kita lihat bagaimana pendapat masyarakat tentang hal ini pada tabel berikut.

Tabel 25

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MENYUSUN LAPORAN MENURUT MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	11	18,33 %
Berperanan	16	26,67 %
Netral	18	30,00 %
Tidak berperanan	7	11,67 %
Sangat tidak berperanan	8	11,33 %
Jumlah :	60	100,00 %

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari data lapangan tersebut terlihat bahwa peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan menurut masyarakat adalah cukup berperanan.

Untuk mengetahui secara keseluruhan tingkat peranan Kepala Desa Selli menurut sebarak responden akan diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 26
 SEBARAN MENURUT RESPONDEN DAN PERANAN KEPALA DESA SELLI
 DALAM MENYUSUN LAPORAN

Responden!	Peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan									
	! SB	%	B	%	N	%	TB	%	STB	%
Pemerintah	2	22,22	1	11,11	4	44,44	2	22,22	-	-
T.Masy.	!	-	2	40	2	40	1	20	-	-
Masyarakat	11	18,33	19	26,67	18	30	7	11,67	-	-

Sumber data : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel tersebut nampak bahwa secara keseluruhan dari ketiga kelompok responden tingkat peranan yang tertinggi adalah netral 24, menyusul berperan 19 kemudian sangat berperan dengan indikasi 13 lalu tidak berperan 10 dan terakhir sangat tidak berperan 8. Dengan demikian tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan menurut ketiga kelompok responden adalah berperan.

7. Peranan Kepala Desa Selli dalam Membuat Inventarisasi.

Inventarisasi yang dimaksud disini ialah hal-hal yang diperlukan dalam rangka pembangunan yang harus di inventarisir atau dicatat oleh Kepala Desa sebagai pertanggung jawaban Kepala Desa Selli secara administratif. Untuk mengetahui tingkat peranan yang dimainkan oleh Kepala Desa Selli dalam hal ini, akan kita lihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 27

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMBUAT INVENTARISASI MENURUT
PEMERINTAH

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat Berperanan	-	-
Berperanan	2	22,22 %
N e t r a l	2	22,22 %
Tidak berperanan	4	44,44 %
Sangat tidak berperanan	1	11,11 %
Jumlah	9	100,00 %

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis,

Dari tabel diatas terlihat bahwa peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi menurut pemerintah adalah sangat berperanan tidak ada, berperanan 22,22 %, netral 22,22% tidak berperanan 44,44 % dan sangat tidak berperanan 11,11 %. Dengan demikian peranan Kepala Desa Selli menurut tabel diatas adalah kurang berperanan.

Sedangkan menurut Tokoh Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MENYUSUN INVENTARISASI MENURUT
TOKOH MASYARAKAT

Tingkat Peranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	1	20 %
berperanan	2	40 %
N e t r a l	1	20 %
Tidak berperanan	1	20 %
Sangat Tidak berperanan	-	-
J u m l a h	5	100 %

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel di atas terlihat bahwa peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi adalah : sangat berperanan 20 %, berperanan 40 %, netral 20 % dan tidak berperanan 20 % serta sangat tidak berperanan tidak ada. Dengan demikian peranan Kepala Desa Selli menurut tabel di atas adalah berperanan. Sedangkan menurut masyarakat dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 29

PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM MEMBUAT INVENTARISASI MENURUT MASYARAKAT

Tingkat Feranan	Frekuensi	Prosentase
Sangat berperanan	5	8,33 %
Berperanan	12	20,60 %
N e t r a l	22	36,67 %
Tidak berperanan	12	20,00 %
Sangat tidak berperanan	9	15,00 %
J u m l a h :	60	100,00 %

Sumber : Hasil Data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dari tabel diatas terlihat bahwa Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi menurut masyarakat adalah sangat berperanan 8,33 %, berperanan 20 % , netral 36,67 % tidak berperanan 12 % dan sangat tidak berperanan 15 %. Dengan demikian tingkat peranan Desa Selli menurut tabel diatas adalah kurang berperanan.

Bila dikumpulkan dari ketiga kelompok responden terdahulu maka akan nampak seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 30

SEBARAN MENURUT RESPONDEN DAN PERANAN KEPALA DESA SELLI DALAM
MEMBUAT INVENTARISASI

Responden	Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inven- tarisasi.									
	SB	%	B	%	N	%	TB	%	STB	%
Pemerintah	-	-	2	22,22	2	22,22	4	44,44	1	11,11
T.Masyarakat	1	20,00	2	40,00	1	20,00	1	20,00	-	-
Masyarakat	5	8,33	12	20,00	22	36,67	12	20,00	9	15,00
Jumlah	6		16		25		17		10	

Sumber : Hasil data lapangan tahun 1991 yang diolah penulis.

Dengan melihat tabel diatas dapat diketahui bahwa sebaran menurut responden menilai tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi adalah sangat berperanan 6, berperanan 25, tidak berperanan 17 dan sangat tidak berperanan 10. Dengan demikian tingkat peranan Kepala Desa Selli dalam hal ini adalah kurang berperanan.

B. Faktor-Faktor penghambat.

Sesuai dengan wawancara penulis dengan Kepala Desa Selli maka yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa Selli dalam menjalankan fungsinya diidentifikasi sebagai berikut :

1. Dari segi ekonomi yang menghambat yaitu :

- iklim yang tidak menentu dan serangan hama sehingga menurunkan produktifitas.
- Sarana produksi yang masih kadang-kadang terlambat tiba

pada waktu dibutuhkan petani sehingga petani sering mempergunakan sarana produksi pertaniannya.

2. - Dari segi sosial budaya.

Dibidang adat istiadat masyarakat dapat dikatakan transisi, sedangkan swadaya gotong royong dapat dikatakan latent dimana masyarakat baru dapat memberikan partisipasinya dalam pembangunan apabila ada instruksi dari pemerintah.

3. Dari segi agama dan keyakinan, penduduk Desa Selli adalah pemeluk agama Islam, namun masyarakat masih teguh berpegang pada kebiasaan atau adat istiadat yang sifatnya mengikat, maka usaha pembaharuan dapat terhalang karenanya.

4. Dari segi faktor keamanan. dibidang ini atau keamana lingkungan desa sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah seperti terbentuknya LKMD yang dibentuk atas pembentukan masyarakat itu sendiri yang didasari atas instruksi pemerintah setempat.

BAB V P E N U T U P

Setelah menguraikan tentang peranan Kepala Desa Selli sebagai administrator pembangunan yang dipadukan dari BAB I sampai BAB IV maka sampailah kita pada bab penutup yang didalamnya akan ditarik beberapa kesimpulan yang dianggap mendasar terhadap pembahasan terdahulu, disamping itu akan diberikan pula beberapa buah pikiran dalam bentuk saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Selli Kecamatan Lapparlaja.

A. Kesimpulan.

Peranan Kepala Desa Selli sebagai Administrator pembangunan dapat disimpulkan berdasarkan wawancara penulis dengan para responden yang terdiri atas pemerintah, Tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri sebagai berikut :

1. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali dan pengumpul data berdasarkan sebaran menurut responden adalah berperanan (tabel 06).
2. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali terhadap penyusunan rencana desa berdasarkan sebaran menurut responden adalah berperanan (tabel 10).
3. Peranan Kepala Desa Selli sebagai pengendali pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan sebaran menurut responden adalah berperanan (tabel 14).

4. Peranan Kepala Desa Selli dalam memanfaatkan bantuan-bantuan desa berdasarkan sebaran menurut responden adalah berperanan (tabel 18).
5. Peranan Kepala Desa Selli dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat berdasarkan sebaran menurut responden adalah sangat berperanan (tabel 22).
6. Peranan Kepala Desa Selli dalam menyusun laporan berdasarkan sebaran menurut responden adalah netral (tabel 26).
7. Peranan Kepala Desa Selli dalam membuat inventarisasi adalah netral (tabel 30).

Sedangkan faktor-faktor penghambat yang ditemui oleh Kepala Desa Selli dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator pembangunan berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Desa Selli adalah meliputi empat bidang yaitu :

1. Dari segi ekonomi; iklim yang tidak menentu sehingga menurunkan produktivitas dan sarana produksi yang kadang-kadang terlambat tiba sehingga tidak efektif.
2. Dari segi sosial budaya; dibidang adat istiadat yang masih transisi dan gotong royong masyarakat yang latent.
3. Dari segi agama dan keyakinan; walaupun penduduk Desa Selli adalah pemeluk agama Islam namun masyarakat masih tetap berpegang pada adat istiadat atau kebiasaan yang sifatnya mengikat sehingga usaha pembaharuan dapat terhalang karenanya.
4. Bidang keamanan yang sangat tergantung pada kebijaksanaan pemerintah dalam pengelolaannya.

B. Saran-Saran.

- Dengan melihat tingkat Peranan Kepala Desa Selli seperti yang telah diuraikan diatas maka pada kesempatan ini penulis menyarankan agar meningkatkan peranannya terutama perannya dalam membuat laporan dan membuat inventarisasi.
- Mengingat hambatan yang dihadapi dalam membangkitkan swadaya dan partisipasi masyarakat adalah sikap masyarakat yang masih memerlukan dorongan, maka hendaknya Kepala Desa Selli tetap mempertahankan peranannya yang sudah cukup baik untuk senantiasa memberi penjelasan konkrit atau bukti-bukti nyata kepada masyarakat tentang tujuan yang akan dicapai dalam suatu program pembangunan.

BOSOWA



DAFTAR PUSTAKA

- Beratha, I, Nyoman, Drs. 1982. Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Fahmal, A. Muin, SH. dan Kamrul Kasim, SH. 1983. Hal - Hal Fokok Pemerintahan di Daerah dan Desa, Ujung Pandang : Benteng Aznal.
- Gie, The Liang. 1979 . Efisiensi Kerja bagi Pembangunan Negara, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Halyb, M. Noeh. 1986. Ensiklopedia Yurisprudensi Indonesia, Ujung Pandang : CV. Teluk Bone.
- Kartono, Kartini, Dra. 1980 . Pengantar Metodologi Research Sosial, Bandung : Alumni.
- Koesoemahatmadja, R. D. H. Dr. 1978 . Peranan Kota dalam Pembangunan. Bandung : Bina Cipta.
- Korten, David C. 1984 . Pembangunan Yang Memihak Rakyat, Jakarta : Lembaga Study Pembangunan.
- Marbun, B. N. SH. 1988 . Proses Pembangunan Desa Menyongsong , Tahun 2000. Jakarta : Erlangga.
- Nawawi, H. Hadari, Prof. Dr. Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Permana, Budi. Drs. 1988 . Mahasiswa, Integrasi Sosial, Konsensus dan Konflik dalam Kehidupan Politik di Indonesia. (makalah). Ujung Pandang : Direktorat Sosial Politik Propinsi Sulawesi Selatan.

- Saparin, Ny. Sumber, Dra. 1977 . Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Siagian, Sondang.P. 1987 . Administrasi Pembangunan, Jakarta : CV.Haji Mas Agung.
- _____ . 1981 . Filsafat Administrasi, Jakarta : Gunung Agung.
- Sukarno K Drs. 1974 . Dasar-Dasar Management, Jakarta : Telaga Bening.
- Surjadi, A. Drs. 1975 . Pembangunan Masyarakat Desa, Bandung: Alumni.
- Thala.H.M.Drs. 1989 . Geografi Kependudukan, Ujung Pandang: Fisipol Universitas "45" Ujung Pandang.
- Tjokroamidjojo, Bintoro . 1987 . Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : IP3ES.
- _____ . 1986 . Perencanaan Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung.
- Anonim. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II / MPR / 1983 . Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- Anonim. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 2 Tahun 1982. Seri : D Nomor 1 Perda No. 6 Tahun 1981.
- Anonim. Undang-Undang No.5 Tahun 1974. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
- Anonim. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Desa.